

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014

B. Buku

Abdurassyid Priyatna, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Jakarta, 2000, hal. 17

Achmad Mas Santosa, Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Enviromental Legal Standing), Jakarta, ICEL, 1997.

Achmad Mas Santosa, Sejarah Gugatan *Class Action* di Indonesia (Enviromental Legal Standing), Jakarta, ICEL, 1997.

Adi Susanti Nugroho, Pedoman Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) di Indonesia, makalah pada Seminar Setengah Hari PERMA No. 1 Tahun 2002, Jakarta 6 Juni 2002.

Campbell Henry Black, *Black's Law Dictionary* (West Publishing Co., St.Paul Minnesota, tahun 1991)..

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, Jakarta, 2001), h.513.

John J. Cound cs, *Civil Procedure: Cases And Materials* (St. Paul Minn: West Publisihing, 1985).

John J. Cound cs, *Civil Procedure: Cases And Materials* (St. Paul Minn: West Publisihing, 1985).

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1998,

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003).

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).

- Muh. Syahrul R. Lamsu, "Hak Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen," *Lex Privatum* 2 no. 3 (2014): 127.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Setiawan R., *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1993).
- Stuart Sime, *A Practikal Approach to Civil Procedure* (London, Blackstone Press). 626
- Sudaryatmo, *Seri Panduan Konsumen (Memahami Hak Anda Sebagai Konsumen)*, Jakarta, Penerbit Pirac, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1998.
- Sulistini Elise T. dan Rudi T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Jakarta, Penerbit Bina Aksara, Desember 1987
- Sundari, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia)*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002.

C. Lain-lain

- Adi Susanti Nugroho, *Pedoman Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) di Indonesia*, makalah pada Seminar Setengah Hari PERMA No. 1 Tahun 2002, Jakarta 6 Juni 2002.
- Bahwasannya Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (non litigasi) diatur dalam Pasal 85 dan 86 UUPPLH -2009.
- Bambang Sutiyo, *Implementasi Gugatan Class action dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No.10 Oktober 1999.

Bambang Sutiyo. 2004. "Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia". Jurnal Hukum. Vol 11 No 26. hlm 64-65.

Contoh Formulir dan Format dapat dilihat pada buku terbitan Mahkamah Agung RI - Praktek gugatan perwakilan kelompok di Indonesia 2003.

Kadir Mappong, Prosedur Gugatan Perwakilan (Class Action) dan Kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, bahan makalah Seminar Sehari : Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Rangka Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Negara Melalui PERMA No. 1/2002, Oktober 2002.

Kupchela & Hyland (1986:549) sebagaimana disadur oleh E. Sundari dalam "Pengajuan Gugatan Secara Class Action, Suatu Studi Perbandingan & Penerapannya di Indonesia" (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2002).

Ontario Report, Report On Class Action loc (Ministry Of Attorney General, Volume I, 1982).

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam perspektif keperdataan melalui Pengadilan diatur pada Pasal 87, 88, dan 89, UUPPLH-2009.

PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

PERMA RI No.1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Redaksi, "Analisis", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021, Pukul 21:00.

Redaksi, "Class Action", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2436/class-action>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021, Pukul 21:16.

Redaksi, "Kewenangan", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2021, Pukul 21:15.

Report Ontario, Report On Class Action loc (Ministry Of Attorney General, Volume I, 1982), hal. 12.

Report Ontario, Report On Class Action loc (Ministry Of Attorney General, Volume I, 1982).

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 19 Tahun 1964 dan No. 3 Tahun 1965 menegaskan berlakunya HIR dan Rbg sebagai Hukum Acara Perdata dalam sistem peradilan di Indonesia.

Yahya M. Harahap, Beberapa Masalah yang perlu Diperhatikan dalam Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2002, Makalah pada Seminar Setengah Hari PERMA No. 1 Tahun 2002, Jakarta 6 Juni 2002.